



Model Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Ekosistem Pelabuhan Patimban Di Kabupaten Subang

Diah Andani

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang
diahandani@unsub.ac.id

Abstrak

Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang merupakan proyek strategis nasional yang berperan penting dalam pengembangan logistik dan industrialisasi Kawasan Rebana. Namun, kompleksitas aktor dan tumpang tindih kewenangan lintas sektor membuat pengelolaan ekosistem pelabuhan memerlukan pendekatan tata kelola yang kolaboratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika collaborative governance dalam pengelolaan dan pengembangan ekosistem Pelabuhan Patimban serta merumuskan model kolaborasi yang sesuai dengan karakter tata kelola multi-level di wilayah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan pusat dan daerah. Analisis dilakukan secara tematik dengan merujuk pada model collaborative governance Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antarlembaga belum berjalan efektif karena adanya ketidakseimbangan starting conditions antara pemerintah pusat dan daerah, desain kelembagaan yang terfragmentasi, terbatasnya kapasitas kepemimpinan fasilitatif di tingkat daerah, serta proses dialog yang lebih bersifat informatif daripada deliberatif. Ketimpangan kewenangan, minimnya platform kolaborasi formal, dan rendahnya partisipasi masyarakat pesisir memperkuat gap antara arah kebijakan pusat dan kebutuhan lokal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengembangkan Model Collaborative Governance Patimban yang menekankan tiga pilar utama: pembentukan platform kolaborasi lintas aktor, penguatan kepemimpinan fasilitatif pemerintah daerah, dan mekanisme partisipatif terstruktur untuk masyarakat terdampak. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep collaborative governance dalam konteks infrastruktur strategis serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Subang dalam membangun tata kelola pelabuhan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Collaborative Governance

Abstract

The Patimban Port in Subang Regency is a national strategic project that plays a crucial role in supporting logistics development and industrialization within the Rebana Region. However, the complexity of actors and overlapping cross-sectoral authorities requires a collaborative governance approach in managing the port ecosystem. This study aims to analyze the dynamics of collaborative governance in the management and development of the Patimban Port ecosystem and to formulate a collaboration model that aligns with the characteristics of multi-level governance in the region. The research employs a qualitative approach with a case study design through in-depth interviews, field observations, and

document analysis of national and regional policies. Thematic analysis was conducted with reference to the collaborative governance model proposed by Ansell and Gash. The findings indicate that inter-agency collaboration has not functioned effectively due to unequal starting conditions between the central and local governments, fragmented institutional design, limited facilitative leadership capacity at the local level, and dialogic processes that are more informative than deliberative. Power asymmetries, the absence of formal collaborative platforms, and low participation from coastal communities further exacerbate the gap between national policy directions and local needs. Based on these findings, this study develops the Patimban Collaborative Governance Model, emphasizing three main pillars: establishing cross-actor collaboration platforms, strengthening facilitative leadership of local governments, and creating structured participatory mechanisms for affected communities. This study contributes to the development of collaborative governance concepts in the context of strategic infrastructure and provides practical recommendations for national, provincial, and Subang Regency governments in building a more inclusive, adaptive, and sustainable port governance system.

Keywords: Collaborative Governance

Pendahuluan

Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membawa mandat besar bagi transformasi logistik nasional. Posisinya dalam Kawasan Metropolitan Rebana yang meliputi Subang, Majalengka, dan Cirebon menjadikannya simpul strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru melalui integrasi infrastruktur transportasi, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan baru. Kawasan Rebana sendiri dirancang sebagai kawasan super prioritas yang difokuskan pada investasi, industri, pariwisata, dan logistik dengan Pelabuhan Patimban sebagai “gerbang maritim” utamanya. Dengan demikian, keberhasilan Patimban tidak hanya diukur dari kinerja pelabuhan, tetapi dari kemampuan seluruh aktor di tingkat nasional dan daerah untuk membentuk ekosistem logistik yang terkoordinasi, terintegrasi, dan adaptif.

Secara regulatif, pengembangan Pelabuhan Patimban didasari oleh sejumlah kebijakan penting, antara lain Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban sebagai PSN, yang kemudian diperkuat melalui berbagai revisi dan penyesuaian dalam daftar PSN. Pengelolaan pelabuhan berada di bawah otoritas Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Turunan kebijakan lainnya mencakup masterplan pengembangan pelabuhan, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), regulasi tentang kawasan hinterland, dan sejumlah kebijakan turunan yang mengatur konektivitas jalan, pengelolaan operasional, penataan ruang, hingga pengembangan kawasan industri di sekitarnya. Namun, meskipun regulasi pusat memiliki fokus yang kuat pada pembangunan infrastruktur dan operasional teknis, aspek tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta tidak secara eksplisit terperinci dalam kebijakan tersebut.

Pada tingkat pelaksanaan, berbagai aktor terlibat secara simultan dan memiliki kepentingan berbeda. Pemerintah pusat berperan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur utama, sementara investor dan operator pelabuhan menjalankan fungsi manajemen operasional. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Subang memikul tanggung jawab besar dalam penyediaan infrastruktur pendukung

seperti jalan akses, penataan ruang, kesiapan SDM, dan pemberdayaan masyarakat pesisir, termasuk di wilayah Blanakan dan sekitarnya yang terdampak langsung. Kawasan industri, pelaku logistik, serta masyarakat sekitar memiliki kepentingan terhadap peluang ekonomi, lapangan kerja, dan dampak lingkungan dari pengembangan pelabuhan. Kompleksitas kepentingan dan kewenangan ini secara otomatis menuntut adanya pola tata kelola kolaboratif yang efektif.

Namun dalam praktiknya, proses kolaborasi tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip *collaborative governance*. Sejumlah kajian dan laporan lapangan menunjukkan adanya gap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal penyelarasan kebijakan, percepatan infrastruktur pendukung, serta sinkronisasi rencana pembangunan kawasan Rebana. Pemerintah daerah kerap menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal, birokrasi, dan sumber daya manusia untuk mengikuti ritme pembangunan yang didorong oleh pusat. Selain itu, mekanisme partisipasi masyarakat pesisir dan komunitas lokal belum terstruktur dengan baik sehingga aspirasi dan kebutuhan lokal belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan ekosistem pelabuhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan tata kelola yang *top-down* masih mendominasi, sementara prinsip-prinsip kolaborasi seperti *shared decision-making*, *mutual trust*, dan *joint responsibility* belum optimal.

Di sisi lain, Kawasan Rebana pada dasarnya memerlukan model tata kelola yang melampaui sekadar koordinasi antarlembaga. Sebagai kawasan super prioritas dengan multiaktor dan *multilevel governance*, Rebana menuntut integrasi perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta keterlibatan sektor swasta dan masyarakat secara berkelanjutan. Pelabuhan Patimban sebagai pusat logistik utama harus mampu membangun ekosistem yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga inklusif secara sosial. Ketidaksinkronan antara regulasi pusat dengan kesiapan daerah, lemahnya integrasi perencanaan ruang dan infrastruktur, serta minimnya platform kolaborasi lintas sektor menghadirkan gap yang menunjukkan bahwa model *collaborative governance* saat ini belum berjalan secara optimal.

Kondisi tersebut memperkuat urgensi perlunya mengkaji secara mendalam bagaimana model *collaborative governance* dalam pengelolaan dan pengembangan ekosistem Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang seharusnya dibangun. Penelitian ini penting untuk melihat bagaimana aktor-aktor pusat dan daerah berinteraksi, bagaimana proses kolaborasi terjadi dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, serta faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang memengaruhi efektivitas kolaborasi. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi penguatan tata kelola pelabuhan dan pengembangan kawasan Rebana secara berkelanjutan, serta memperjelas peran strategis pemerintah daerah dalam mengelola infrastruktur maritim berskala nasional.

Kerangka Teori

Kerangka teori penelitian ini berlandaskan pada pemikiran mengenai *collaborative governance*, suatu pendekatan tata kelola yang menekankan keterlibatan aktor dari berbagai sektor dalam proses pengambilan keputusan publik. Salah satu model teoritis yang paling berpengaruh adalah model yang dikembangkan oleh

Ansell dan Gash (2008), yang mendefinisikan collaborative governance sebagai suatu pengaturan di mana aktor-aktor publik dan non-publik terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, deliberatif, dan diarahkan menuju konsensus. Menurut mereka, kolaborasi tidak muncul begitu saja, melainkan dibentuk oleh elemen-elemen struktural dan prosedural yang saling berinteraksi.

Dalam model tersebut, terdapat empat komponen utama yang membentuk dasar analisis collaborative governance. Pertama, *starting conditions* yang menjelaskan kondisi awal hubungan antaraktor, termasuk keseimbangan kekuasaan, tingkat konflik atau kepercayaan yang telah terbentuk sebelumnya, dan insentif yang mendorong atau menghambat aktor untuk bekerja sama. Starting conditions dianggap penting karena memengaruhi sejauh mana aktor dapat berpartisipasi secara setara dan bermakna dalam proses kolaborasi.

Komponen kedua adalah *institutional design*, yang mencakup aturan main, struktur forum, mekanisme partisipasi, transparansi, dan prosedur komunikasi. Institutional design menentukan bagaimana kolaborasi diatur, bagaimana aktor bertemu dan berinteraksi, serta bagaimana keputusan dapat dihasilkan. Desain kelembagaan yang jelas dan inklusif diyakini dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog dan pembentukan kesepakatan.

Komponen ketiga adalah *facilitative leadership*, yang berfungsi sebagai pendorong dan penyeimbang dalam proses kolaboratif. Pemimpin fasilitatif tidak mendominasi, tetapi berperan sebagai mediator, pembangun jembatan, dan pengelola proses sehingga aktor dapat terlibat secara konstruktif. Kepemimpinan ini penting terutama dalam situasi yang penuh konflik atau ketidakpercayaan, karena mampu mendorong komitmen kolektif melalui pengelolaan dinamika kelompok.

Komponen keempat adalah *collaborative process*, yang merujuk pada rangkaian aktivitas kolaboratif seperti dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, pembentukan pemahaman bersama, penetapan komitmen, hingga tindakan kolektif. Proses ini dipahami sebagai siklus iteratif yang berkembang dari waktu ke waktu, dan keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kualitas interaksi selama proses ini berlangsung.

Selain kerangka Ansell dan Gash, teori collaborative governance juga diperkaya oleh kerangka integratif yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Mereka memandang kolaborasi sebagai sebuah rezim yang terdiri atas tiga komponen utama: *system context*, *drivers*, dan *collaborative dynamics*. *System context* menjelaskan berbagai faktor lingkungan politik, sosial, hukum, ekonomi yang memengaruhi kebutuhan dan peluang kolaborasi. *Drivers* merupakan pendorong kolaborasi seperti ketergantungan antarlembaga, kebutuhan akan inovasi, atau ketidakpastian kebijakan. Sementara itu, *collaborative dynamics* memuat tiga elemen kunci: *principled engagement* (keterlibatan berbasis prinsip), *shared motivation* (kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama), serta *capacity for joint action* (kapasitas kelembagaan untuk bertindak bersama). Ketiga elemen ini bekerja secara berkesinambungan untuk memungkinkan lahirnya tindakan kolaboratif yang efektif.

Untuk memahami hubungan antarlembaga yang terlibat dalam tata kelola yang kompleks, teori *multi-level governance* juga menjadi landasan penting. Teori ini berangkat dari premis bahwa kekuasaan dan kewenangan tidak terpusat pada satu

level pemerintahan, tetapi tersebar dalam berbagai tingkatan lokal, regional, nasional, bahkan supranasional yang saling berinteraksi. Multi-level governance menekankan bahwa kolaborasi lintas level pemerintahan merupakan konsekuensi logis dari semakin kompleksnya masalah publik modern.

Kerangka teori lainnya adalah teori *institutional capacity*, yang menyoroti kemampuan suatu lembaga untuk merancang, mengelola, dan mempertahankan hubungan kolaboratif. Kapasitas ini meliputi kapasitas struktural, kapasitas sumber daya, kapasitas analitis, serta kapasitas relasional. Kolaborasi antarlembaga hanya dapat berjalan apabila institusi-institusi yang terlibat memiliki kapasitas yang memadai untuk berpartisipasi, berkomunikasi, dan menjalankan peran masing-masing.

Dalam konteks kolaborasi yang melibatkan banyak aktor, teori *network governance* juga memberikan fondasi penting. Teori ini melihat tata kelola sebagai jaringan hubungan horizontal antarorganisasi, di mana keberhasilan kolaborasi bergantung pada kualitas hubungan, struktur jaringan, mekanisme koordinasi, dan kemampuan aktor untuk berbagi informasi serta sumber daya. Network governance menekankan bahwa kolaborasi tidak hanya merupakan kegiatan administratif, tetapi hubungan sosial yang membutuhkan kepercayaan dan norma bersama.

Secara keseluruhan, kerangka teori ini memberikan landasan konseptual untuk memahami bagaimana kolaborasi terbentuk, faktor-faktor apa yang memengaruhinya, bagaimana proses berjalan, serta kondisi apa yang diperlukan agar kolaborasi dapat menghasilkan tindakan bersama yang efektif. Dengan memadukan teori *collaborative governance*, *integrative governance framework*, *multi-level governance*, kapasitas kelembagaan, dan *network governance*, penelitian dapat mengkaji kolaborasi secara lebih holistik baik dari sisi struktur, proses, maupun dinamika hubungan antaraktor.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus karena fenomena *collaborative governance* dalam pengelolaan dan pengembangan ekosistem Pelabuhan Patimban bersifat kompleks, kontekstual, serta melibatkan banyak aktor dengan kepentingan dan kewenangan yang berbeda. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan peneliti menggali secara mendalam proses, dinamika interaksi, serta makna di balik praktik kolaborasi yang terjadi di tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Sementara itu, desain studi kasus digunakan karena Pelabuhan Patimban merupakan kasus spesifik yang tidak dapat dipisahkan dari konteks ruang, waktu, serta konfigurasi kebijakan Kawasan Rebana sebagai kawasan super prioritas nasional.

Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive* dan *snowball sampling*, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung aktor dalam proses kolaborasi. Informan utama mencakup pejabat pada Kementerian Perhubungan yang menangani perencanaan dan operasional Pelabuhan Patimban; pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan pengembangan Kawasan Rebana; pejabat Pemerintah Kabupaten Subang pada perangkat daerah seperti Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta dinas-dinas lain yang relevan; pengelola dan operator pelabuhan; pelaku industri penunjang; serta perwakilan masyarakat pesisir yang terdampak langsung.

Penentuan informan berfokus pada mereka yang memahami dinamika koordinasi, penyelarasan kebijakan, dan proses kolaborasi lintas sektor, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan keseluruhan ekosistem tata kelola Pelabuhan Patimban.

Data dikumpulkan terutama melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap regulasi pusat, kebijakan daerah, masterplan pelabuhan, dokumen perencanaan Rebana, notulen rapat koordinasi, laporan pemerintah, dan publikasi relevan lainnya. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel tanpa melepas fokus pada tema-tema inti collaborative governance, seperti kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas institusi, kepercayaan antaraktor, mekanisme pengambilan keputusan, dan keterlibatan masyarakat. Observasi dilakukan di area pelabuhan serta wilayah sekitar yang terdampak pengembangan kawasan untuk memahami kondisi faktual di lapangan dan melihat sejauh mana implementasi kebijakan pusat terintegrasi dengan kapasitas daerah.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik yang meliputi proses pengumpulan, reduksi, kategorisasi, dan penarikan makna atas data. Setiap data yang diperoleh dibandingkan secara berulang dengan teori collaborative governance dari Ansell & Gash serta kerangka Emerson dan Nabatchi untuk menemukan pola kesesuaian, dinamika proses, maupun celah kolaborasi yang muncul dalam konteks Patimban. Analisis dilakukan secara iteratif dan terus diperbarui seiring bertambahnya data sehingga interpretasi yang dihasilkan lebih kaya dan akurat.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan cross-check informasi antaraktor. Data dari pemerintah pusat dibandingkan dengan data pemerintah daerah, operator pelabuhan, dan masyarakat untuk memastikan konsistensi dan reliabilitas temuan. Validitas juga diperkuat dengan member checking, yaitu mengonfirmasi kembali pemahaman peneliti kepada beberapa informan kunci untuk memastikan bahwa interpretasi yang diperoleh tidak menyimpang dari kondisi faktual. Selain itu, peneliti menerapkan audit trail dengan mencatat seluruh proses analisis dan keputusan penelitian sehingga transparansi metodologis dapat dipertanggungjawabkan.

Lokasi penelitian berfokus di Kabupaten Subang, terutama wilayah Kecamatan Pusakanagara dan Kecamatan Pamanukan sebagai daerah yang menjadi hinterland langsung Pelabuhan Patimban, serta Kecamatan Blanakan sebagai wilayah pesisir yang terdampak aktivitas pengembangan kawasan. Beberapa kegiatan pengamatan tambahan juga dilakukan di area operasional pelabuhan, kantor perangkat daerah, serta titik-titik pengembangan infrastruktur pendukung yang berkaitan dengan Kawasan Rebana. Pemilihan lokasi ini dilakukan untuk menangkap hubungan antara kebijakan pusat, kesiapan daerah, hingga respon masyarakat lokal dalam keseluruhan ekosistem tata kelola Pelabuhan Patimban

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika pengelolaan dan pengembangan ekosistem Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip collaborative governance sebagaimana dirumuskan Ansell dan Gash. Dengan menjadikan empat elemen utama starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process

sebagai lensa analisis, ditemukan sejumlah hambatan struktural dan prosedural yang menjelaskan mengapa kolaborasi belum berjalan efektif dan bagaimana model kolaborasi yang sesuai dapat dirumuskan.

Temuan pertama terkait *starting conditions* memperlihatkan ketidakseimbangan kekuasaan yang cukup signifikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam model Ansell dan Gash, *starting conditions* yang tidak seimbang akan menyebabkan kolaborasi berjalan tersendat, karena aktor yang lebih lemah akan kesulitan menempatkan kepentingannya dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini tampak jelas di Patimban: regulasi dan arahan kebijakan didominasi oleh pusat, sementara daerah lebih banyak menjadi pelaksana teknis dari agenda yang telah ditetapkan. Ketimpangan ini diperburuk oleh keterbatasan kapasitas fiskal dan perencanaan di tingkat Kabupaten Subang yang membuat daerah tidak cukup kuat untuk mengimbangi ritme pembangunan pusat. Dalam konteks teori, hal ini menunjukkan bahwa kondisi awal kolaborasi tidak memenuhi syarat *power-sharing*, sehingga memengaruhi proses selanjutnya.

Elemen kedua, *institutional design*, juga menunjukkan permasalahan penting. Ansell dan Gash menekankan bahwa kolaborasi yang efektif membutuhkan aturan main, mekanisme partisipasi, dan ruang dialog yang jelas dan disepakati bersama. Namun penelitian menemukan bahwa desain kelembagaan Pelabuhan Patimban justru terfragmentasi. Pemerintah pusat bergerak dengan struktur sektoralnya (Kemenhub, Marves, BKPM), pemerintah provinsi menjalankan mandat Kawasan Rebanda, sementara pemerintah kabupaten memiliki forum koordinasi yang terbatas. Tidak ada satu platform resmi yang memfasilitasi dialog setara lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Kondisi ini menghambat pembentukan forum deliberatif padahal forum inilah inti dari *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash. Akibatnya, interaksi antarlembaga hanya sebatas koordinasi teknis jangka pendek, bukan penyusunan agenda bersama yang strategis.

Pada elemen ketiga, *facilitative leadership*, penelitian menemukan adanya kesenjangan kapasitas kepemimpinan kolaboratif. Menurut Ansell dan Gash, kepemimpinan fasilitatif sangat penting untuk mendamaikan kepentingan, menjembatani perbedaan, dan memperkuat kepercayaan. Dalam konteks Patimban, Pemerintah Kabupaten Subang sebenarnya memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Namun kapasitas daerah yang terbatas baik dari aspek SDM, anggaran, maupun struktur kelembagaan membuat fungsi fasilitatif ini tidak berjalan optimal. Sebaliknya, pusat cenderung memimpin secara hierarkis, bukan fasilitatif, sehingga proses kolaboratif sulit tumbuh. Ketidakhadiran kepemimpinan fasilitatif yang kuat ini menjadi salah satu hambatan terbesar dalam membentuk proses kolaborasi yang sehat.

Elemen terakhir, *collaborative process*, memperlihatkan bahwa proses dialog kolaboratif belum terbentuk sesuai prinsip *face-to-face dialogue*, *trust-building*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes* yang ditekankan Ansell dan Gash. Pemerintah pusat cenderung mendominasi narasi, sementara aspirasi daerah dan masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi. Dialog yang terjadi lebih banyak bersifat informatif, bukan deliberatif. Selain itu, tingkat kepercayaan antaraktor masih variatif; pelaku industri menginginkan kepastian regulasi, pemerintah daerah menuntut dukungan untuk penataan wilayah, sementara masyarakat lokal mengharapkan kompensasi dan pemberdayaan yang lebih jelas. Ketidakselarasan

motivasi dan aspirasi ini membuat shared motivation sulit tumbuh, sehingga proses kolaborasi tidak berkembang menjadi tindakan bersama (joint action).

Jika keempat elemen teori Ansell dan Gash dipetakan ke temuan lapangan, tampak bahwa hambatan terbesar berada pada:

1. ketidakseimbangan starting conditions,
2. desain kelembagaan yang tidak integratif,
3. minimnya kepemimpinan fasilitatif, dan
4. proses dialog yang belum deliberatif.

Keempat hambatan ini secara langsung menjelaskan mengapa collaborative governance belum terbentuk dan apa yang perlu diadaptasi untuk menciptakan model yang lebih sesuai.

Dari hasil analisis tersebut, penelitian ini kemudian menghasilkan model collaborative governance yang relevan untuk ekosistem Pelabuhan Patimban. Model ini menekankan tiga hal utama. Pertama, perlunya pembentukan platform kolaborasi formal lintas sektor dan lintas level pemerintahan yang menjadi ruang deliberatif bersama antara pusat, provinsi, kabupaten, operator pelabuhan, pelaku industri, dan masyarakat. Platform ini dapat berbentuk Patimban Joint Governance Forum yang menjalankan fungsi koordinasi strategis, pemantauan, dan penyelesaian isu lintas sektor.

Kedua, model ini menekankan penguatan kepemimpinan fasilitatif di tingkat daerah, terutama Pemerintah Kabupaten Subang, dengan dukungan kapasitas kelembagaan, fiskal, dan regulatif. Pemerintah daerah harus memiliki kapasitas untuk menjadi broker, navigator, dan bridge-builder dalam menghubungkan kepentingan antara pusat dan komunitas lokal.

Ketiga, model ini mengusulkan pembentukan mekanisme partisipatif terstruktur bagi masyarakat pesisir dan kelompok terdampak lainnya agar principled engagement dan shared motivation dapat tercipta. Mekanisme ini dapat berupa forum tematik, konsultasi publik berkala, atau skema partisipasi berbasis komunitas.

Dengan demikian, penggunaan teori Ansell dan Gash bukan hanya mampu mengupas permasalahan empiris di Patimban, tetapi juga menghasilkan model collaborative governance yang lebih responsif terhadap kondisi lokal, lebih sensitif terhadap relasi kekuasaan, dan lebih inklusif dalam proses pengambilan keputusan. Model ini diharapkan dapat memperbaiki praktik tata kelola pelabuhan sekaligus mendukung integrasi pengembangan dalam Kawasan Rebana secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan ekosistem Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip collaborative governance sebagaimana dirumuskan oleh Ansell dan Gash. Dinamika hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, operator pelabuhan, pelaku industri, dan masyarakat lokal berjalan dalam kerangka koordinasi, namun belum berkembang menjadi kolaborasi yang setara dan deliberatif. Starting conditions yang tidak seimbang, terutama dominasi kewenangan pemerintah pusat dan keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, menjadi hambatan struktural paling utama bagi terbentuknya kolaborasi yang ideal.

Desain kelembagaan yang terfragmentasi menunjukkan belum adanya platform kolaboratif yang mampu menyatukan seluruh aktor dalam ruang dialog yang sistematis dan berkelanjutan. Ketidakterhubungan antarsektor dan antarlembaga menyebabkan arah pengembangan kawasan sering kali berjalan parsial dan tidak sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan lokal. Keterbatasan kepemimpinan fasilitatif di tingkat daerah semakin memperlemah kemampuan aktor-aktor lokal untuk memainkan peran strategis dalam negosiasi dan penyusunan agenda bersama. Proses kolaboratif di lapangan masih bersifat informatif dan teknokratis, sehingga belum menghasilkan shared motivation maupun joint action yang kuat.

Dengan menggunakan teori Ansell dan Gash sebagai lensa analisis, penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa keempat komponen collaborative governance starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process belum terpenuhi secara optimal. Ketidakselarasan itu yang kemudian melahirkan gap kolaborasi pada ekosistem Pelabuhan Patimban. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengembangkan model collaborative governance Patimban yang menekankan pentingnya platform kolaborasi formal, penguatan kepemimpinan fasilitatif daerah, mekanisme partisipatif yang terstruktur, serta penyelarasan kewenangan dan kapasitas antara pusat dan daerah. Model ini memberikan kerangka konseptual baru yang lebih sesuai dengan karakter multi-level governance Kawasan Rebana dan kebutuhan masyarakat lokal yang terdampak oleh pembangunan pelabuhan

References

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., & Torfing, J. (Eds.). (2021). *Handbook on theories of governance*. Edward Elgar Publishing.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Freeman, J., & Ramanathan, R. (2020). Infrastructure governance and collaborative networks. *Public Management Review*, 22(7), 1013–1032.
- Hertin, J., & Berkhout, F. (2003). Analyzing institutional adaptation to climate change: A multi-level governance perspective. *Global Environmental Change*, 13(2), 129–140.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2020). *Rencana Induk Pelabuhan Patimban*. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2021). Pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2020). *Governance, politics and the state*. Red Globe Press.
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University Press.
- Sabar, J. (2022). Collaborative governance dalam pembangunan infrastruktur strategis di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(2), 145–160.
- Subang Regency Government. (2022). *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang 2021–2026*. Pemerintah Kabupaten Subang.
- Torring, J., Peters, B. G., Pierre, J., & Sørensen, E. (2012). *Interactive governance: Advancing the paradigm*. Oxford University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban sebagai Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.